

Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Transformasi Digital Pelayanan Publik

Darman¹, Maman Musa², Irfan Akadji³, Aulia Abdul Rahman⁴, Marsanda Hatiku⁵, Nirva Agrianti⁶, Farlian B Ma'u⁷

¹⁻⁷ Universitas Bina Mandiri Gorontalo

*Corresponding author

E-mail: darman@ubmg.ac.id*

Article History:

Received: June, 2026

Revised: June, 2026

Accepted: June, 2026

Abstract: Transformasi digital menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa. Namun, keberhasilan implementasi transformasi digital sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa dalam memahami dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan aparatur Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango mengenai pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik serta memperkuat kesiapan mereka dalam menghadapi perkembangan teknologi di lingkungan pemerintahan desa. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, simulasi, dan sesi tanya jawab yang melibatkan aparatur desa sebagai peserta utama. Materi yang diberikan mencakup konsep transformasi digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, pengelolaan data pelayanan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Simulasi dilakukan untuk memberikan gambaran praktis mengenai penerapan teknologi digital dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan responsif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki antusiasme yang tinggi selama pelaksanaan kegiatan dan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peran teknologi digital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui sesi simulasi dan tanya jawab, peserta juga mampu mengidentifikasi berbagai peluang serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi RMAN transformasi digital di lingkungan kerja mereka. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan wawasan aparatur desa mengenai pentingnya digitalisasi pelayanan publik dan mendorong tumbuhnya kesadaran untuk terus mengembangkan kompetensi digital dalam mendukung pelayanan yang berkualitas. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menjadi langkah strategis dalam mendukung penguatan kapasitas

aparatur desa serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Keywords:

Kapasitas Aparatur Desa, Transformasi Digital, Pelayanan Publik, Pemerintahan Desa, Teknologi Informasi

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada tingkat desa. Transformasi digital menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan publik karena mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Indonesia melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, transformasi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana modernisasi administrasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pelayanan publik, memperluas akses informasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pemanfaatan teknologi digital yang optimal dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola data, menyampaikan informasi secara cepat, dan memberikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif terhadap perkembangan zaman (Mustanir et al., 2024; Hajar & Arma, 2024).

Meskipun berbagai kebijakan digitalisasi pemerintahan telah dikembangkan, implementasi transformasi digital di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam memahami dan mengoperasikan teknologi digital yang mendukung pelayanan publik. Banyak aparatur desa yang masih memiliki keterampilan digital yang terbatas sehingga pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan pelayanan masyarakat belum berjalan secara optimal. Selain itu, perubahan budaya kerja dari sistem konvensional menuju sistem digital juga membutuhkan proses adaptasi yang tidak sederhana. Rendahnya literasi digital, keterbatasan pengalaman penggunaan aplikasi pelayanan publik, serta kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas menjadi faktor yang sering menghambat keberhasilan transformasi digital di tingkat desa. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Setiyono (2024) menunjukkan bahwa kapabilitas digital aparatur desa merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi konsep Smart Village dan digitalisasi pelayanan desa. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dalam mendukung keberhasilan transformasi digital pelayanan publik.

Transformasi digital pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup perubahan pola pikir, budaya organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pelayanan publik. Aparatur desa sebagai pelaksana utama pelayanan publik memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan implementasi berbagai inovasi digital yang diterapkan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif seperti sosialisasi, penyampaian materi, simulasi, dan peningkatan pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian Anggraeni, Haryati, dan Ferriswara (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi pelayanan publik di era digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi yang memadai harus diimbangi dengan kompetensi aparatur yang mampu mengoperasikannya secara optimal.

Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel semakin meningkat dari waktu ke waktu. Masyarakat tidak lagi hanya mengharapkan pelayanan yang selesai sesuai prosedur, tetapi juga menginginkan pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan didukung oleh teknologi digital yang memudahkan proses administrasi. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar mampu memenuhi harapan masyarakat yang semakin dinamis. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian Ningtyas dan Angin (2023) menunjukkan bahwa inovasi pelayanan berbasis digital mampu meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi desa serta memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa berbagai inovasi digital dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Desa Butu, Kecamatan Tilingkabila, Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu desa yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun demikian, sebagaimana kondisi yang banyak ditemukan pada pemerintahan desa lainnya, penguatan kapasitas aparatur desa masih menjadi kebutuhan penting dalam mendukung implementasi transformasi digital secara optimal. Berdasarkan hasil identifikasi awal dan komunikasi dengan pemerintah desa, masih diperlukan peningkatan pemahaman aparatur mengenai konsep transformasi digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, serta strategi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Kondisi tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur desa melalui penyampaian materi, simulasi, dan sesi tanya jawab

mengenai transformasi digital pelayanan publik. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru sekaligus meningkatkan kesiapan aparatur desa dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan aparatur Desa Butu mengenai pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik serta memperkuat kapasitas mereka dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan adaptif. Melalui kegiatan penyampaian materi, simulasi, dan diskusi interaktif, aparatur desa diharapkan mampu memahami peran teknologi digital sebagai instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan pengetahuan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik di tingkat desa secara berkelanjutan.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Penguatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Transformasi Digital Pelayanan Publik dilaksanakan di Desa Butu, Kecamatan Tilogkabila, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 13 Mei 2026 dengan sasaran utama aparatur desa, perangkat pelayanan, dan unsur masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik desa. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang menempatkan peserta sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran dan penguatan kapasitas. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu meningkatkan keterlibatan aktif peserta dalam memahami kebutuhan pelayanan publik berbasis digital serta mendorong perubahan perilaku kerja aparatur desa menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan mitra melalui koordinasi dengan pemerintah desa untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pelayanan publik, kemampuan digital aparatur, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan administrasi berbasis elektronik. Hasil identifikasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan materi dan strategi pelaksanaan kegiatan sehingga program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan nyata aparatur desa. Pendekatan partisipatif dalam penguatan kapasitas aparatur telah banyak direkomendasikan dalam berbagai studi karena mampu meningkatkan keberhasilan implementasi transformasi digital dan memperkuat keberlanjutan program

pengembangan sumber daya manusia di sektor publik (Siregar & Setiyono, 2024; Normawati, 2025).

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode sosialisasi, pelatihan, diskusi interaktif, simulasi, praktik langsung, dan pendampingan. Materi yang diberikan mencakup konsep transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pelayanan publik, penggunaan media komunikasi digital, pengelolaan data berbasis elektronik, serta strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, responsif, dan akuntabel. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan mengombinasikan metode ceramah dan studi kasus sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga mampu menghubungkan materi dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi penggunaan media digital pelayanan publik dan praktik pengelolaan administrasi berbasis teknologi informasi guna meningkatkan keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam mendukung transformasi digital pelayanan desa. Model pelatihan berbasis praktik dan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi digital aparatur pemerintah desa karena memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif dan kontekstual terhadap kebutuhan organisasi (Maulana et al., 2024; Anwar et al., 2025).

Tahap akhir kegiatan dilakukan melalui evaluasi dan refleksi bersama peserta untuk mengukur tingkat pemahaman, partisipasi, serta respons aparatur desa terhadap materi yang telah diberikan. Evaluasi dilaksanakan melalui observasi langsung selama kegiatan berlangsung, diskusi umpan balik, identifikasi perubahan pemahaman peserta, serta pengamatan terhadap kemampuan peserta dalam mengaplikasikan materi yang telah diperoleh selama sesi praktik dan simulasi. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas program pengabdian sekaligus merumuskan rekomendasi tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan dalam implementasi pelayanan publik berbasis digital di lingkungan pemerintahan desa. Pendekatan evaluatif ini sejalan dengan prinsip pengembangan kapasitas organisasi sektor publik yang menekankan pentingnya proses pembelajaran berkelanjutan, peningkatan kompetensi aparatur, dan penguatan tata kelola kelembagaan untuk mendukung keberhasilan transformasi digital pelayanan publik. Dengan demikian, metode pelaksanaan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan publik yang

modern, efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Ningtyas & Angin, 2023; Hajar & Arma, 2024).

Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Penguatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Transformasi Digital Pelayanan Publik di Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango berlangsung dengan baik dan memperoleh respons positif dari seluruh peserta. Kegiatan difokuskan pada penyampaian materi, simulasi, dan sesi tanya jawab yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya transformasi digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Sejak awal kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang disampaikan karena topik yang diangkat memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tingginya perhatian peserta menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Siregar dan Setiyono (2024) yang menjelaskan bahwa kapasitas digital aparatur desa merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa. Kebutuhan akan peningkatan kompetensi aparatur semakin penting seiring berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses melalui teknologi digital.

Pada sesi penyampaian materi, peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep transformasi digital dalam pemerintahan desa serta peran teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Materi yang disampaikan mencakup pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan, pengelolaan data pelayanan, penyampaian informasi publik, serta komunikasi pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat. Selama proses penyampaian materi, peserta terlihat aktif mengikuti penjelasan dan menunjukkan ketertarikan terhadap berbagai contoh penerapan digitalisasi yang telah berhasil diterapkan di berbagai daerah. Materi yang diberikan juga membantu peserta memahami bahwa transformasi digital bukan sekadar penggunaan perangkat teknologi, tetapi merupakan perubahan sistem kerja yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasil ini mendukung penelitian Anggraeni, Haryati, dan Ferriswara (2024) yang menyatakan bahwa transformasi pelayanan publik desa memerlukan

pemahaman aparaturnya terhadap pemanfaatan teknologi serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja digital.

Hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan bahwa sebagian aparaturnya desa telah memanfaatkan perangkat teknologi dalam aktivitas administrasi sehari-hari, namun penggunaannya masih terbatas pada fungsi-fungsi dasar. Beberapa peserta mengakui bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik belum dilakukan secara optimal karena keterbatasan pengetahuan mengenai sistem pelayanan berbasis elektronik dan kurangnya kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman aparaturnya masih menjadi kebutuhan penting dalam mendukung modernisasi tata kelola pemerintahan desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maulana et al. (2024) yang menemukan bahwa kompetensi digital aparaturnya desa masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan transformasi digital pemerintahan desa. Oleh karena itu, penyampaian materi yang dilakukan dalam kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting untuk memperkuat kesiapan aparaturnya dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilengkapi dengan sesi simulasi yang bertujuan memberikan gambaran praktis mengenai penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik desa. Melalui simulasi tersebut, peserta diperkenalkan pada berbagai bentuk pelayanan berbasis digital yang dapat diterapkan untuk mendukung administrasi pemerintahan desa secara lebih efektif. Simulasi membantu peserta memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mempercepat proses pelayanan, mempermudah pengelolaan data, dan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat. Peserta menunjukkan ketertarikan yang tinggi selama simulasi berlangsung karena materi yang disajikan berkaitan langsung dengan aktivitas pelayanan yang mereka lakukan sehari-hari. Pendekatan simulatif terbukti mampu memperjelas konsep yang telah disampaikan pada sesi materi sehingga peserta lebih mudah memahami penerapan transformasi digital dalam konteks nyata pelayanan publik. Hasil ini mendukung penelitian Mustanir et al. (2024) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan aplikasi dan sistem digital dalam pemerintahan desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama pada aspek kecepatan, transparansi, dan kemudahan akses masyarakat.

Kegiatan simulasi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi transformasi digital di lingkungan pemerintahan desa. Melalui proses tersebut, peserta menyadari bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tidak

hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan komitmen organisasi dalam mengadopsi perubahan. Pemahaman ini penting karena transformasi digital pada dasarnya merupakan proses perubahan yang memerlukan adaptasi baik dari aspek teknis maupun budaya kerja organisasi. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hendra Gunawan, Nurhayati, dan Syahrir (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital pelayanan publik dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kepemimpinan, serta budaya organisasi yang mendukung inovasi dan penggunaan teknologi.

Sesi tanya jawab menjadi salah satu bagian yang paling interaktif dalam kegiatan pengabdian ini. Peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa. Pertanyaan yang muncul umumnya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi desa, pengelolaan data pelayanan masyarakat, penggunaan media digital sebagai sarana komunikasi publik, serta strategi peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan adanya kebutuhan yang besar terhadap informasi dan pengetahuan mengenai transformasi digital. Diskusi yang berlangsung juga memperlihatkan bahwa aparatur desa memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kondisi ini memperkuat temuan Anwar et al. (2025) yang menyatakan bahwa pengembangan kompetensi aparatur merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelayanan publik berbasis digital.

Melalui sesi tanya jawab, tim pelaksana juga memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi aktual yang dihadapi aparatur desa dalam menjalankan pelayanan publik. Berbagai kendala yang disampaikan peserta menunjukkan bahwa proses transformasi digital di tingkat desa masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi digital, adaptasi terhadap teknologi baru, serta kebutuhan akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun demikian, diskusi yang berlangsung menunjukkan adanya kesiapan dan kemauan peserta untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu membangun kesadaran aparatur desa mengenai pentingnya transformasi digital sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari perspektif pelayanan publik, kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya pelayanan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peserta memahami

bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat membantu mempercepat proses pelayanan administrasi, meningkatkan akurasi data, memperluas akses informasi, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemahaman tersebut menjadi modal penting dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih modern dan profesional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hajar dan Arma (2024) yang menjelaskan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis digital mampu meningkatkan nilai publik, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan wawasan dan pemahaman aparatur desa mengenai transformasi digital pelayanan publik. Penyampaian materi, simulasi, dan sesi tanya jawab yang dilaksanakan secara terintegrasi mampu memberikan pengetahuan baru serta memperluas perspektif peserta mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tingginya antusiasme dan partisipasi peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa program penguatan kapasitas aparatur desa melalui transformasi digital sangat relevan dengan kebutuhan pemerintahan desa saat ini. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa dalam menghadapi tantangan pelayanan publik di era digital.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Penguatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Transformasi Digital Pelayanan Publik yang dilaksanakan di Desa Butu, Kecamatan Tilogkabila, Kabupaten Bone Bolango telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat positif bagi aparatur desa sebagai peserta kegiatan. Melalui penyampaian materi, simulasi, dan sesi tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya transformasi digital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini berhasil meningkatkan wawasan aparatur desa terkait pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan, pengelolaan informasi, serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif, transparan, dan responsif. Antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap peningkatan kapasitas digital aparatur desa masih sangat tinggi sebagai upaya menghadapi tuntutan pelayanan publik di era digital.

Selain meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan implementasi transformasi digital, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran aparatur desa akan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern. Simulasi yang diberikan mampu membantu peserta memahami penerapan teknologi digital dalam konteks pelayanan publik desa, sedangkan sesi tanya jawab memberikan ruang bagi peserta untuk mendiskusikan berbagai permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mendukung penguatan kapasitas aparatur desa serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ke depan, upaya peningkatan kapasitas aparatur desa perlu terus dilakukan secara berkelanjutan agar transformasi digital dapat diimplementasikan secara optimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat desa.

Daftar Referensi

- Anggraeni, S. N., Haryati, E., & Ferriswara, D. (2024). *Transformation of Public Services of Village and Village Governments by Era Digital*. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i2.513>
- Anwar, K., Sugiyanto, L., & Koesoemaningsih, R. (2025). *Manajemen Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa dalam Mendukung Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Ngawi*. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 8(1). <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v8i1.9920>
- Gunawan, H., Nurhayati, & Syahrir, M. (2025). *Institutional Capacity and Digital Transformation in Village Public Service Management*. <https://journal.unair.ac.id/JPSI>
- Hajar, S., & Arma, N. A. (2024). *Co-Creating Public Value into Digital-Based Public Service Innovation in the Village Governance*. *Open Journal of Indonesian Public Administration*. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.15891>
- Maulana, R. Y., Subekti, D., Putra, D. S., Beriansyah, A., & Yusuf, M. (2024). *Penguatan Kapasitas Digital dalam Menghadapi Transformasi Digital untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa*. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.31315/psnpm.v5i1.14995>

- Mustanir, A., Nisa, N. A., Razak, M.R.R., Sellang, K., & Jermsttiparsert, K. (2024). *Is it Possible for Village Government Public Services to Be Qualified Using Digital-Based Applications?*. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 15(3). <https://doi.org/10.18196/jsp.v15i3.381>
- Ningtyas, V. N. C., & Angin, R. (2023). *Inovasi Menuju Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Kajian Sistem Manajemen Pelayanan Desa (SIMPEDA) di Desa Balung Lor*. *Indonesian Journal of Public Administration Review*. <https://doi.org/10.47134/par.v1i1.1937>
- Normawati. (2025). *Transformasi Digital Tata Kelola Pelayanan Administrasi Desa Menuju Smart Village: Penguatan Kapasitas Aparatur dan Partisipasi Masyarakat di Desa Nania, Kota Ambon*. *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.63822/1tfz6g38>
- Siregar, J. E., & Setiyono, B. (2024). *Kapabilitas Digital dalam Upaya Transformasi Menuju Smart Village pada Pelaksanaan Digitalisasi Pelayanan Desa Sepakung*. *Journal of Politic and Government Studies*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/47401/0>